

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Donaldson dan Davis (1991) dalam Wahida (2015) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi". Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. *Theory Stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dalam penelitian Wahida (2015) yang sejak awal perkembangannya. Akuntansi Organisasi sektor publik telah dipersiapkan agar memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai

dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa;

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas laporan keuangan tersebut.

Halim (2007:126) menyatakan bahwa;

Akuntabilitas Publik merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar dan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan dan berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah kepada publik untuk mempertanggungjawabkan serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang merupakan unsur penting dalam laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk

dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Mardiasmo (2009:21) menyatakan bahwa jenis- jenis akuntabilitas pengelolaan keuangan terdiri dari dua meliputi :

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)
Merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountabiliy*)
Merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Rosjidi (2001) dalam penelitian Dito Aditia Darma, (2019) Akuntabilitas dibedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Internal
Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah negara termasuk juga pemerintahan yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara tingkatan dan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Akuntabilitas Eksternal
Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

2.1.2.3 Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2009:21) terdapat dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang harus dipenuhi oleh organisasi publik antara lain meliputi:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)
Merupakan akuntabilitas yang memegang erat nilai kejujuran dalam penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum merupakan akuntabilitas terkait dengan jaminan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Merupakan proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur 18 administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Merupakan akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Merupakan akuntabilitas terkait pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Penyajian Laporan Keuangan

PP Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa;

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sehingga laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada serta sebagai informasi pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Erlina (2015:19) menjelaskan bahwa;

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gabungan dari laporan OPD yang ada dalam pemerintahan daerah sesuai kerangka konseptual pp 71/ tahun 2010 paragraf 24 menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Penyajian Laporan keuangan memerlukan aparatur daerah dalam menyusun laporan keuangan agar terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan

untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. PSAP No.1 Paragraf 9 yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.1.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan terdiri dari :

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya .
2. Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71/2010 pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber dan keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhannya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa

lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan Operasional (LO). Selain itu laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual komponen-komponen laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintah meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pemerintah daerah secara tersanding.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi suatu keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat / daerah selama periode tertentu.
5. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Adapun unsur yang di cakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.1.3.4 Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP Nomor 71/2010). Selanjutnya Menurut Harefa (2014:30) mengemukakan bahwa kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Sementara itu menurut Erlina dan Rasdianto (2015:6) ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki meliputi:

a. Relevan (*relevance*)

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan meliputi:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu (*timeliness*)

Laporan keuangan pemerintah harus disajikan tepat waktu dan dapat berpengaruh sehingga berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.

4. Lengkap (*complere*)

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, meliputi mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempegaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

b. Andal (*reliable*)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan , tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka

pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memiliki karakteristik.

1. Penyajian jujur (*representaitonal faithfulness*)
Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 2. Dapat diverifikasi (*verifiability*)
Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
 3. Netralitas (*neutral*)
Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. **Dapat dibandingkan (*comporable*)**
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
- d. **Dapat Dipahami (*understandable*)**
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan Operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Wijaya, Anim, dan Sutrisna (2016) dalam penelitian (Zeny Antika (2020) Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Fauziyah (2017:4) Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan

keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan suatu akses yang memudahkan mereka yang ingin mengetahui secara langsung informasi mengenai laporan keuangan. Dapat dipastikan dengan adanya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses laporan keuangan maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2.1.4.2 Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan

Fauziah (2017:4) Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dengan memenuhi hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan
Laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
2. Kemudahan
Pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. *Accessible*
Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern

2.1.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa; Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan laporan keuangan, pengamatan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.5.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern terdapat 5 unsur pokok meliputi sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)
Merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Pimpinan dari suatu instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.
2. Penilaian Resiko (*Risk assesment*)
Merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian suatu resiko terdiri atas indentifikasi resiko dan analisis resiko.
3. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)
Informasi merupakan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)
Merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dari suatu instansi pemerintah dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan resiko dalam mencapai tujuan.
5. Pemantauan (*Monitoring*)
Merupakan suatu proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti. pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
1	Christy Natalia Lewier (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten	1. Penyajian laporan keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan 3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan		1) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 3) Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2	Dewi Asfiryati (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai	1. Penyajian laporan keuangan 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Sistem Pengendalian Intern variabel Intervening	1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2) penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 3) penerapan sistem akuntansi

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
		variabel intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai)			keuangan daerah berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern. 4) penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern 5) sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 6) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian intern sebagai mediasi atau variabel intervening. 7) penyajian laporan keuangan berpengaruh tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian intern sebagai mediasi atau variabel intervening.
3	Theresia Yuliana Mansyuer	Pengaruh Sistem Pengendalian	1. Sistem pengendalian intern		1) Sistem pengendalian intern pemerintah

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
	(2020)	Intern Pemerintah, Penyajian, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>pemerintah</p> <p>2. Penyajian</p> <p>3. Aksesibilitas laporan keuangan</p> <p>4. akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>		<p>berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>2) Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>3) Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>
4	Peggy Sande (2013)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	<p>Independen :</p> <p>X1 : Penyajian Laporan Keuangan</p> <p>X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p>Dependen :</p> <p>Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>		<p>1) Penyajian laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
5	Embun Widya Sari (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu	1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Sistem Pengendalian Intern 3. Aksesibilitas Laporan Keuangan 4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Gaya Kepemimpinan 2. Transparansi	1) Sistem Pengendalian Intern (SPI), Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu. Sedangkan 2) Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu. 3) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh variabel system pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan gaya kepemimpinan
6	Wahyuni Putu Sri (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan 3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan		1) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif

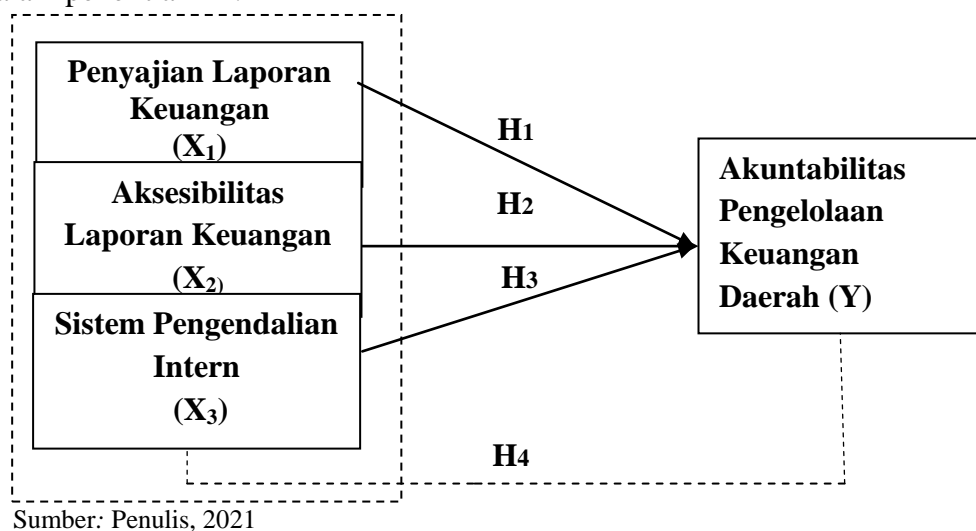
No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
		Keuangan Daerah (Studi Empiris pada pemerintahan Kabupaten Badung)			terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
7	Ajeng Ayu Sabriani (2019)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya	1.Penyajian Laporan Keuangan 2.Sistem Pengendalian Internal 3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		1) Penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2) Penyajian laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di Kota Tasikmalaya. 3) Variabel sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya

Sumber: Penulis, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2016:2) “Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti”. Dasar perumusan untuk menggambarkan pengaruh variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (OPD) Pemerintah Kota Palembang.

Berikut ini merupakan gambaran kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- _____ : Uji signifikansi Simultan (Uji F)
 : Uji signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan gambar 2.1 di atas menggambarkan peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting agar dapat menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Dasar perumusan menggambarkan pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah pemerintah kota Palembang.

Untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dengan variabel independen, maka penulis menggambarkan hubungan bahwa :

H1 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan

H2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

H4 : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:94) Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan .Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Pemerintah Kota Palembang

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan hal ini dikarenakan pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sande (2013) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupa laporan keuangan kepada pengguna laporan pemerintah. Sasaran

pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Semakin baik dalam penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Sande (2013).

Dalam penelitian yang dilakukan Sande (2013) tentang penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Wahyuni (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan penyajian laporan keuangan yang baik maka dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Pemerintah Kota Palembang

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa;

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Pemerintah Kota Palembang

Armando (2013:27) menyatakan bahwa;

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang lebih memadai agar dalam pencapaian efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan akan penyajian suatu laporan keuangan pemerintah yang terlihat dari nilai informasi laporan keuangan.

Sedangkan Menurut Peraturan PP/No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa “Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih et al. (2019), Masyhur (2017), dan Sari (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nugraha (2011) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.4 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Pemerintah Kota Palembang

Menurut Priyatno (2012:39, “Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen”. Penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern, diduga berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Hasil penelitian ini merujuk dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mustofa (2012) dan Sande (2013) yang menemukan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat agar masyarakat dengan mudah mengakses laporan keuangan, dengan didukung dengan adanya sistem pengendalian intern yang memadai sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada OPD Pemerintah Kota Palembang